

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PENGOPTIMALAN WISATA BINTAN MANGROVE

Dhani Akbar¹⁾ dan Khairul Ikhsan²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Maritim Raja Ali Haji

²⁾Program Studi Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat Email : rittersarmy@gmail.com

ABSTRACT

Public-private partnership in globalization is utilized as an arena for investment competition in the interests of elites to gain power. Cooperation between private sector and smart community provides benefits to the community through pro-public-mangrove-tourism program. Therefore, it can improve the competitiveness of coastal communities in a sustainable manner. The research explores the optimization of mangrove tourism potential in coastal areas. The object of this research is Public-Private Partnership with a focus on cooperation between the Bintan Resort Company (PT) and Tourism-Awareness Groups (Pokdarwis) in Bintan Mangrove Tourism Optimization by conducting research in Bintan Mangrove, Bintan Regency. The type of this research is descriptive with a qualitative approach. The type of partnership carried out by BRC with the community is Additional, Management and Ownership (Add, Operate and Transfer-AOT. Agreements that have been designed and agreed to go according to shared commitments and principles, the principle used in this partnership is the principle of empowering where community groups have little potential for their abilities, however, they are hindered by limited capital, marketing and technology, and these weaknesses must be recognized and changed by the empowerment program from the private sector so that the community can play a role and contribute widely in the process of implementing Bintan Mangrove tourism. The partnership between PT Bintan Resort Cakrawala and the Tourism Awareness Group in the Public-Private Partnership approach is a partnership between the private sector and the community which uses collaborative dynamics partnership design which is more oriented to community empowerment as a solution for innovation development, creativity for this creative tourism industry.

Keywords: private, tourism, mangrove, collaborative

ABSTRAK

Public-private partnership di era globalisasi ini dimanfaatkan sebagai arena pertarungan investasi kepentingan para elit untuk mendapatkan dan melanggengkan kekuasaan. Dalam konteks ini adalah kerjasama yang dilakukan private sector dengan smart community memberikan manfaat kepada masyarakat melalui program-program wisata mangrove yang pro-publik sehingga dapat meningkatkan daya saing masyarakat pesisir secara berkelanjutan.. Penelitian ini juga mengeksplorasi pengoptimalan potensi wisata mangrove di daerah pesisir. Objek penelitian ini adalah praktek public-private partnership dengan fokus kepada kerjasama antara Perseroan Terbatas (PT) Bintan Resort Cakrawala dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Pengoptimalan wisata Bintan Mangrove dengan melakukan penelitian di Bintan Mangrove, Kabupaten Bintan. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe kemitraan yang dilakukan BRC bersama masyarakat adalah Tambahan, Kelola dan Alih Milik (Add, Operate and Transfer-AOT. Kesepakatan yang telah dirancang dan disepakati berjalan sesuai dengan komitmen dan prinsip bersama, maka prinsip yang digunakan dalam kemitraan ini adalah prinsip pemberdayaan (empowering) dimana kelompok masyarakat tidak sedikit memiliki potensi atas kemampuan yang dimiliki. Namun, terhalang pada keterbatasan modal, pemasaran dan teknologi. Kelemahan tersebut harus diakui dan diubah dengan adanya program pemberdayaan dari pihak swasta sehingga masyarakat dapat berperan dan berkontribusi secara luas dalam proses pelaksanaan wisata Bintan Mangrove. Kemitraan antara PT Bintan Resort Cakrawala dan Kelompok Sadar Wisata dalam pendekatan public-private partnership yaitu kemitraan antara sektor swasta dan masyarakat dimana menggunakan desain kemitraan collaborative dynamics dimana lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sebagai solusi untuk pengembangan inovasi, kreativitas untuk industri wisata kreatif ini

Kata Kunci: privat, wisata, mangrove, kolaboratif.

PENDAHULUAN

Fokus studi penelitian ini pada praktik *public-private partnership* dengan menganalisis aktor-aktor yang terlibat dalam mengembangkan wisata mangrove di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Penelitian ini juga mengeksplorasi peran *private sector* (swasta) dan *smart community* (kelompok masyarakat) dalam mengoptimalkan potensi wisata mangrove di daerah pesisir. Kata pesisir biasa diterapkan untuk menunjukkan suatu lingkungan atau daerah yang letaknya tidak jauh dari pantai. Daerah pesisir memiliki peluang untuk dijadikan objek pariwisata mengingat kondisi geografis Kepulauan Riau yang mencakup 96 persen laut dan hanya 4 persen daratan maka diperlukan kerjasama (*partnership*) antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk pemanfaatan daerah pesisir menjadi estimasi wisata, salah satunya wisata mangrove.

Kontemporer ini pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, swasta maupun masyarakat sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan. (Ansell & Gash, 2007)

Konsep *public-private partnership* atau kemitraan antara pemerintah dengan swasta atau swasta dengan masyarakat sudah menjadi hal yang umum dalam melaksanakan suatu program. Berbeda dengan masa lampau, dalam hal penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik misalnya hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kini sektor swasta dan *smart community* ikut terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan kepariwisataan.

Realitas ini menarik untuk dikaji dilihat dari perspektif pencapaian kontribusi wisata mangrove pada kerjasama *private sector* dengan *smart community*. Secara spesifik, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik di desa Teluk Sebong Lago, Kecamatan Teluk Sebong yang *notabene* memiliki banyak daerah pesisir. Dampak dari *public-private partnership* yaitu menghasilkan orientasi publik di bidang kepariwisataan yang merupakan bentuk investasi yang berkelanjutan oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam mengembangkan sektor pariwisata.

Public-private partnership di era globalisasi ini bisa saja bernasib lain, yaitu dimanfaatkan sebagai arena pertarungan investasi kepentingan para elit untuk mendapatkan dan melanggengkan kekuasaan. Dalam konteks ini menarik untuk dilihat apakah kerjasama yang dilakukan *private*

sector dengan *smart community* memberikan manfaat kepada masyarakat melalui program-program wisata mangrove yang pro publik sehingga dapat meningkatkan daya saing masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah praktek *public-private partnership* dengan fokus kepada kerjasama antara Perseroan Terbatas (PT) Bintan Resort Cakrawala dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Pengoptimalan wisata Bintan Mangrove dengan melakukan penelitian di Bintan Mangrove, desa Teluk Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan.

Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau peristiwa sebagaimana adanya, dan memberikan gambaran objektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi. Adapun penelitian berjenis deskriptif ini untuk memuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Menurut Kontur, 2003, (hal 18) penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya kualitatif, umumnya berbentuk narasi atau gambar-gambar. pada penelitian kualitatif ada data berupa angka-angka tetapi sebenarnya angka-angka tersebut hanya menjelaskan sesuatu. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun didalam melihat kebenaran

tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadang kala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacak lebih jauh kebalik sesuatu yang nyata tersebut.

Lokasi penelitian ini dilakukan Bintan Mangrove, desa Teluk Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Bintan Mangrove, desa Teluk Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, karena di kawasan ini merupakan salah satu objek wisata martitimyang dilakukan oleh praktisi wisata (*private*) bersama dengan Komunitas Sadar Wisata sehingga menarik untuk diteliti bagaimana peranan masyarakat dalam konsep *collaborative governance*. Penelitian ini dimulai pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2018.

Informan adalah orang-orang yang ada pada latar penelitian yang bisa dimintai keterangan dan informasi (Moelong, 2000). Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi sumber bagi peneliti dalam memperoleh informasi yang dapat diakui keabsahannya. Adapun penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria-kriteria yang terdapat pada tujuan penelitian. Informan yang peneliti tentukan yakni Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan, Kepala Bagian Recruitmen and Training Development Human Resource Departement PT Bintan

Resort Cakrawala, dan Ketua Komunitas Sadar Wisata Bintan Mangrove, desa Teluk Sebung Lagoi, Kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan.

Menurut Nazir (Sugiyono, 2013), pengumpulan data adalah proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data dapat pula diartikan sebagai cara peneliti menentukan metode setepat-tepatnya untuk memperoleh data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Miles dalam Sugiyono (2013), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, hingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan, dan keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Public-Private Partnership dalam Pengoptimalan Wisata

Perseroan Terbatas Bintan Resort Cakrawala atau PT. BRC sendiri adalah anak perusahaan *Gallant Venture Ltd.* Fungsi utamanya adalah mengoperasikan resort dan pengembangan properti di *Resort International Bintan Beach*, Lagoi-utara Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagaimana keterangan dari Bapak Andri Haris selaku Kepala Bidang Recruitment and Training Development Human Resource Departement, beliau mengatakan bahwa:

“BRC adalah perusahaan developer dan operator kawasan pariwisata lagoi yang mengelola fasilitas umum, perizinan wisata lagoi dikelola oleh perusahaan. Ranah kita yaitu lahan, tenaga listrik, air, jalan, alat komunikasi dan sarana sarana penunjang itu dikelola oleh perusahaan. Resort dan hotel mereka sifatnya investor. Di bidang pariwisata penyediaan penginapan dan program harian mereka lakukan tidak ada kaitannya dengan BRC. BRC lebih menitikberatkan fasilitas umum jadi kita lebih mengoprasikan ke wisatawan. BRC sendiri tidak memiliki resort. Perusahaan mempunyai 8 cabang tetapi induk pusatnya di Singapura. Namanya induknya yaitu Gallant Venture Ltd.”

Misi perusahaan BRC adalah mengembangkan, mengoperasikan dan mempromosikan resort Bintan sebagai tujuan liburan dan investasi *property* yang paling populer di Asia. Resort pantai internasional Bintan dibangun berdasarkan kerjasama antara Indonesia dan Singapura yang berkomitmen mengembangkan bagian utara Pulau Bintan. Untuk memperlancar proses pengembangan resort pantai internasional (BBIR), tim koordinasi Provinsi Riau (TKPR) dibentuk dan diangkat pada tahun 1992 oleh pemerintah untuk memfasilitasi implementasi peraturan pemerintah pusat dalam pengembangan BBIR.

TKPR dibentuk untuk memperlancar proses perizinan yang terkait dengan pengembangan proyek resort Bintan dalam hal proses misalnya: IMB, TKA, Izin Impor,

Izin Usaha dan lain sebagainya. Adapun tipe kemitraan yang dilakukan BRC bersama masyarakat adalah Tambahan, Kelola dan Alih Milik (*Add, Operate and Transfer-AOT*) dimana bentuk kerjasama ini dimana mitra swasta bertanggungjawab untuk melakukan perluasan dan penambahan kapasitas atas fasilitas wisata, selain pengelolaan resort-resort maka salah satunya hadirnya wisata Bintan Mangrove sebagai tambahan dari pelayanan yang diberikan BRC kepada wisatawan.

Kantor pertama TKPR berada di Tanjunguban karena minimnya fasilitas kantor dan infrastruktur lainnya di Bintan Resort. Perpindahan TKPR dari Tanjunguban ke Lagoi terjadi pada tahun 1996. Fungsi TKPR secara bertahap diimplementasikan oleh PT Bintan Resort Cakrawala di Lagoi dan diakhiri sepenuhnya pada tahun 2006. Sampai saat ini PT.BRC melakukan semua fungsi operasional di Bintan Resort di bawah anak perusahaan *Gallant Venture Ltd.* Sebagai perusahaan terbuka di bursa efek Singapura.

Selain mengelola Bintan Resort, PT Bintan Resort Cakrawala juga mengembangkan objek wisata Bintan Mangrove dibawah koperasi Wira Artha yang masih menjadi bagian perusahaan dan bekerjasama dengan masyarakat desa Teluk Sebung Lagoi (YETHAS) dalam pengelolaannya. Koperasi Wira Arta sendiri merupakan badan hukum yang berdasar atas asas kekeluargaan yang semua anggotanya terdiri dari perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya dimana anggotanya terdiri dari

karyawan-karyawan PT. Bintan Resort Cakrawala. Adapun koperasi yang merupakan bagian dari PT Bintan Resort Cakrawala ini merupakan koperasi yang berorientasi memberikan pelayanan jasa wisata kepada wisatawan sebagaimana keterangan dari Bapak Andri Haris selaku Kepala Bidang Recruitment and Training Development Human Resource Departement, beliau mengatakan bahwa:

"Kerjasama lebih kepada kemitraan pengembangan misalnya pihak PT ada pendampingan usaha desa kayak mereka melakukan bisnis didesa itu dan pihak PT mendampingi mereka yang mengarahkan dan memberikan masukan yang disekitarandesa teluk sebung. Pihak PT BRC tidak melakukan perjanjian tertulis antara PT dan masyarakat desa teluk sebung karena sifatnya masing saling memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam mengembangkan wisata mangrove Tidak ada mou dengan masyarakat sekitar karena tidak ada payung hukum anak tetapi lebih kepada secara lisan rasa tanggungjawab dari perusahaan untuk mengembangkan masyarakat sekitar dan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap lingkungan, khususnya mangrove. Pihak PT memberikan bantuan kepada desa dalam bentuk barang karena itu hanya program dari pihak perusahaan memberikan bantuan kepada masyarakat tapi tidak mengharap feedback dari masyarakat untuk perusahaan."

Menurut J A M Reijniers (1994) ada 2 argumentasi penting dalam *public-private partnership*, sebagaimana yang dikemukakan bahwa:

Solving the government's financing deficit by cutbacks in investment expenditure, and looking for

possibilities of financing the projects from other sources; finding new markets for investment companies, as they are faced with a decrease in one of their investment objectives because of cutbacks in the government's financing deficit."

Kemudian menurut E. & Savas (2000) memiliki pandangan berbeda tentang PPP:

"Infrastructure projects are increasingly being built through public-private partnerships (PPPs). Unlike the general use of this term as mentioned above, PPP in this sense refers to an arrangement where government states its need for capital-intensive, long-lived infrastructure and the desired facility is built using a complex combination of government and (mostly) private financing and then operated by a private entity under a longterm franchise, contract, or lease."

Lebih lanjut Osei-Kyei & Chan (2015) menjelaskan sebagai berikut:

"Public-private partnership (PPP) has been defined in several ways by researchers and practitioners with each definition varying slightly from each other. Through PPP schemes, the private sector's skill and management expertise is employed in delivering public infrastructure projects. In fact, this method of procurement provides an effective way of delivering "value for money" public infrastructure as well as combining the advantages of competitive tendering, flexible negotiations and risk allocation between parties."

Memulai sebuah kerjasama dalam bentuk kemitraan dibutuhkan arahan dan landasan berupa prinsip agar seluruh pihak

memahami tanggung jawab dan perannya masing-masing. Kesepakatan yang telah dirancang dan disepakati berjalan sesuai dengan komitmen dan prinsip bersama, maka prinsip yang digunakan dalam kemitraan antara PT Bintang Resort Cakrawalah dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdawis) ini adalah prinsip pemberdayaan (*empowering*) dimana kelompok masyarakat tidak sedikit memiliki potensi atas kemampuan yang dimiliki. Namun, terhalang pada keterbatasan modal, pemasaran dan teknologi. Kelemahan tersebut harus diakui dan diubah dengan adanya program pemberdayaan dari pihak swasta sehingga masyarakat dapat berperan dan berkontribusi secara luas dalam proses pelaksanaan wisata Bintang Mangrove. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, swasta dapat berperan melalui:

- Pengurangan hambatan dan kendala partisipasi masyarakat.
- Menyusun program yang lebih memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia guna memenuhi kebutuhan (*social learning process*). Adapun partisipasi masyarakat dalam proses kemitraan ini adalah keterlibatan dalam hal eksekusi pelayanan wisata mangrove yang ada di lapangan dimana Kelompok Sadar Wisata Bintang Mangrove sebagai *smart community* yang ada di desa Teluk Sebong Lagoi seperti menjadi operator dan atau pemandu wisata, jasa *life jacket*, jasa perahu masyarakat sebagai transportasi wisata mangrove, *snorkeling*.

Sebagaimana keterangan dari Bapak Andri Haris selaku Kepala Bidang Recruitment and Training Development Human Resource Departement perihal

keterlibatan dari masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

"Menyinggung masalah mangrove, kalau mangrove itu dikelola oleh masing masing operator, operator itu yang mengelola orang-perorangan lalu berkumpul bersama, ada satu yayasan yang namanya yekas (mungkin kalau saya ingat) yaitu berupa yayasan yang termasuk binaan PT BRC bersama kelompok sadar wisata yang ada disana mereka itu menjalankan usaha tour mangrove Yang mengelola bintang mangrove koperasi wira arta unit bisnis nya yaitu tour mangrove, statusnya sama seperti operator operator lainnya, kita salah satu operator koprasi wira arta mengelola tamu dari BRC dalam tour mangrove dilakukan oleh koprasi wiraarta. Mangrove ada hubungan antara perusahaan dan koprasi dan dijalankan oleh koprasi. Masyarakat berperan sebagai operator, ada 5 operator pekerjanya dari mereka terus kepemilikannya masih orang itu juga dan bukan orang dari luar teluk sebong menjadi bentuk partisipasi dari masyarakat di hutan mangrove. Kepemilikan masih dibawah pengelolaan perusahaan, masyarakat hanya melakukan oprasional untuk tour mangrove."

Dari keterangan tersebut didukung dalam berita Batam Pos. Co.Id dimana dalam kerjasama antara PT. BRC dengan YETHAS ini cukup progresif dimana dari Perusahaan sendiri mengeluarkan kebijakan dana kontribusi untuk masyarakat. YETHAS mendukung kebijakan dana kontribusi yang diterapkan Komite Pengawasan Pengelolaan Bintang Mangrove sebab melalui dana itulah masyarakat dapat merasakan kesejahteraan serta alam di sekitar Sungai Sebong Lagoi juga terjaga dan terlestarikan. Sebagaimana keterangan dari Manajer YETHAS, Riounan Caroline Parson. Beliau mengatakan bahwa:

"Kebijakan menetapkan dana kontribusi sangat menguntungkan semua pihak. Bahkan tamu dan pekerja juga dijamin asuransi keselamatannya."

Riouna mengungkapkan bahwa komite dan seluruh operator Bintang Mangrove telah bersepakat untuk memberikan dana kontribusi setiap kali kegiatan. Besaran dana kontribusi yang disepakati yaitu Rp. 55.000 dari harga tiket perseorangannya Rp. 205.000 sehingga operator akan mendapat keuntungan bersih sebesar Rp. 150.00 perorang sekali trip. Sedangkan dana kontribusi yang dipungut sebesar Rp. 55.000 itu dipergunakan untuk kepentingan umum. Diantaranya dana kontribusi kepada masyarakat di dua desa sebesar Rp. 15.000 dan sisanya sebesar Rp. 40.000 digunakan untuk konservasi mangrove. (Sumber Batam Pos. Co. Id)

Lebih lanjut Bapak Iwan Winarto selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memberikan keterangan tentang latar belakang hadirnya Pokdarwis itu sendiri dalam mengembangkan wisata Bintang Mangrove baik bersama pemerintah maupun masyarakat. Beliau berkata:

"Awalnya mangrove ini berdiri karena adanya visi misi yang sama dalam kelebihan desa untuk wisata melihat dari semua sisi-sisi yang ada di desa. Dan terdorong dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk mengembangkan potensi dan sekarang hutan Bintang Mangrove dibawahnaungan Pokdarwis. Pokdarwis sendiri ada di setiap desa,dan ada peran pemerintah yang ikut andil di dalamnya. Dalam mengembangkan hutan Bintang Mangrove peran serta juga datang dari masyarakat sekitar, masyarakat nelayan dan operasional boat. Bersinergi bersama nelayan agar

optimal seperti contoh bila pengunjung banyak kami meminta pertolongan angkutan dengan menggunakan kapal nelayan."

Tentunya dalam pengelolaan wisata Bintan Mangrove akan disertai beberapa hambatan-hambatan semisal nya komunikasi dan koordinasi antara kedua belah pihak dan penyalahgunaan bantuan yang diberikan PT Bintan Resort Cakrawala kepada masyarakat sebagaimana keterangan dari Bapak Andri Haris selaku Kepala Bidang Recruitment and Training Development Human Resource Departement, beliau mengatakan bahwa:

"Ada juga hambatan hambatan dari pihak perusahaan ke masyarakat seperti miss communication, jadi apa yang diharapkan oleh masyarakat sama apa yang bisa diberikan perusahaan itu biasanya tidak ketemu, perusahaan juga mempunyai limit atau batasan apa yang diinginkan masyarakat tidak bisa diberikan semua, ada beberapa hal yang memang perusahaan berikan secara bertahap jadi tidak langsung diberikan, kendala lainnya tidak ada karena sifatnya itu mutualisme artinya sama sama membutuhkan dari perusahaan membutuhkan keterlibatan masyarakat, dan masyarakat juga membutuhkan penghasilan sebagai mata pencaharian, mata pencaharian nya itu mengoprasikan usaha wisata tour mangrove, pihak PT BRC juga memberikan bantuan kepada masyarakat desa, anak anak desa dan anak anak karyawan."

Lebih lanjut beliau mengatakan mengenai penyalahgunaan bantuan masih bisa perusahaan toleransi karena substansi dari permasalahan yang tidak perlu dibawa berlarut-larut karena sifatnya tidak *urgent* bagi perusahaan. Beliau berkata:

"So fars, mungkin ada tetapi kasusnya kecil ya, minor lah dan itu tidak terlalu kita anggap sebagai kendala atau masalah masih bisa kita tanggulasi rill nya sih saya tidak tau, penyalahgunaannya didalam, mungkin ada yang jual, atau penjagaan atau perawatan fasilitas yang mungkin masih ada miss dari kita maupun masyarakat. tetapi yang jelas.... Selalu ada perbaikan yang kita lakukan seperti itu, termasuk dari bentuk kerjasama nya itu sendiri ataupun mungkin dari..... Kalau yang perlu kita tingkatkan atau kita naikkan ya itu tadi, tapi kalau secara overall tidak ada kendala yang sampai memutuskan hubungan kerjasama karena sifatnya multialisme, masyarakat membutuhkan kita disini lain kita juga membutuhkan kehadiran masyarakat disini."

Dari beberapa pernyataan narasumber diatas dapat dinyatakan bahwa desain kemitraan yang dilakukan pada studi kasus penelitian ini adalah kemitraan yang dinamis (*collaborative dynamics*) dimana PT Bintan Resort Cakrawala ini melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengoptimalan wisata Bintan Mangrove atau lebih dikenal dengan *shared motivation* dimana menekankan pada elemen-elemen yang ada pada aspek yang tidak nampak dalam setiap personal atau sering disebut modal sosial dimana terdiri dari *mutual trust*, rasa saling percaya akan muncul seiring pihak-pihak saling bekerja sama, memahami, menghormati kepentingan satu sama lain dan saling menunjukkan bahwa mereka layak, dapat diprediksi dan dapat diandalkan.

Mutual understanding, dimana secara spesifik merujuk pada kemampuan untuk memahami dan menghormati posisi dan

kepentingan satu sama lain, meskipun ketika salah satu pihak ada yang tidak setuju. Dengan kata lain bagaimana setiap personal memiliki rasa simpati terhadap suatu hal yang dihadapkan pada pihak lain. Terakhir adalah *internal legitimacy*, dengan adanya rasa saling memahami dan menghormati peranan dan kondisi setiap personal maka akan menghasilkan rasa percaya. Masing-masing individu merasa bahwa partisipan dapat dipercaya dan kredibel sebagai rekan kerja..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diulas, maka dapat dilihat kemitraan antara PT Bintan Resort Cakrawala dan Kelompok Sadar Wisata dalam pendekatan *public-private partnership* yaitu kemitraan antara sektor swasta dan masyarakat dimana menggunakan desain kemitraan *collaborative dynamics* dimana lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sebagai solusi untuk pengembangan inovasi, kreativitas untuk industri wisata kreatif salah satunya wisata Bintan Mangrove ini.

Kemitraan secara lisan dan tindakan yang dilakukan antara PT Bintan Resort Cakrawala dengan Kelompok Sadar Wisata sudah berjalan baik beberapa tahun belakangan ini hanya saja perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak secara tertulis agar jelas hak dan kewajiban antara kedua belah pihak sehingga desain *collaborative dynamics* dapat berkembang menjadi kontrak konsesi (*Concession Contract* antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Kontur, R. (2003). *Metode Penelitian: untuk penulisan skripsi dan tesis*. Jakarta: PPM.
- Moleong, L. (2000). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Roda Karya.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

JURNAL

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- E.S., & Savas. (2000). Privatization and Public Private Partnerships. *Academica*, (9), 1–17.
- J A M Reijniers, J. (1994). Organization of public-private partnership projects. *International Journal of Project Management*, 12(3), 137–142. [https://doi.org/10.1016/0263-7863\(94\)90028-0](https://doi.org/10.1016/0263-7863(94)90028-0)
- Osei-Kyei, R., & Chan, A. P. C. (2015). Review of studies on the critical success factors for public-private partnership (PPP) projects from 1990 to 2013. *International Journal of Project Management*, 33(6), 1335–1346. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.02.008>

INTERNET

- Batam Pos. (2015). *Beroperasi di Mangrove Toure Harus Ikuti Aturan Komite*. [internet] tersedia melalui: <https://batampos.co.id/2017/07/26/beroperasi-di-mangrove-toure-harus-ikuti-aturan-komite>